

Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat

M. Iqbal Suprayoga¹, Hendry Saladin², Jusmani³

¹F. Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang

²F. Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang, hendrysaladin62@gmail.com

³F. Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the expenditure budget at the Lahat Regency Regional Financial Board (BKD Lahat Regency) which can affect budget performance in the Lahat Regency government. The data taken is the data of the 2016-2018 Expenditure Budget Target and Budget Realization. What is measured by comparing the realization of the expenditure budget with the target of the Expenditure Budget with the effectiveness criteria in accordance with the Minister of Home Affairs Decree No. comparing the realization of the expenditure budget with the target budget. In 2016, the level of effectiveness of the expenditure budget was at 92.49%. This year the budget criteria can be said to be effective, in 2017 the level of effectiveness has decreased by 1.48% with a percentage of 91.01%, the decrease is not too significant this year, also the budget criteria can be said to be effective. And in 2018 it decreased by 87.69%. This year the budget criteria are said to be quite effective. The decline occurred due to the limited quality of human resources in regional financial management and there were several programs / activities that had not been optimally realized.

Keywords: Effectiveness, Budget

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Anggaran Belanja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat (BKD Kabupaten Lahat) yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran pada pemerintah Kabupaten Lahat. Data yang diambil merupakan data Target Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Tahun 2016-2018. Yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target Anggaran Belanja dengan kriteria Efektivitas sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa tingkat kriteria efektivitas berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996. Dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas anggaran belanja pada persentase 92.49 %. Pada tahun ini kriteria anggaran dapat dikatakan efektif, pada tahun 2017 tingkat efektivitas mengalami penurunan yaitu sebesar 1.48 % dengan persentase sebesar 91.01 %, penurunan terjadi tidak terlalu signifikan pada tahun ini juga kriteria anggaran dapat dikatakan efektif. Dan pada tahun 2018 menurun sebesar 87.69 %. Pada tahun ini kriteria anggaran dikatak cukup efektif. Penurunan terjadi karena Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah dan ada beberapa Program/Kegiatan yang belum terealisasi secara optimal.

Kata Kunci : Efektivitas, Anggaran Belanja

A. PENDAHULUAN

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang

harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam pemerintahan daerah diharapkan mampu memberikan motivasi untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk melaksanakan pemerintahan secara terpadu agar setiap pembangunan yang ada sesuai dengan prioritas dan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat. Dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah, instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta Lembaga-lambaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for many* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran. Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana

keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*.

B. KAJIAN TEORI

1) Pengertian anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2018:62) Anggaran berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran suatu merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Sedangkan menurut Wiratna (2015:28) anggaran adalah pertanggung jawaban dan pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Sedangkan menurut Mahmudi (2016:59) anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik.

2) Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018:63) menjelaskan bahwa anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)

Anggaran merupakan Galat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
- Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
- Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak

dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu :

- Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
 - Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavourable variances*)
 - Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
 - Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
- d. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*).
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)
Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan dalam anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik dan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
- g. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*.
- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*)
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

3) Pengertian Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PSAP No. 2, Paragraf 7). Sementara menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 belanja merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Menurut (Erlina dkk, 2015:154) dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- b. Belanja modal
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnyayang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
- c. Belanja lain-lain/belanja tak terduga
Belanja lain-lain tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk pengeluaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rang menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- d. Transfer keluar
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Sedangkan Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi;

1. Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga
Belanja bunga untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - c. Belanja subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa agar yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - d. Belanja hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah

daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- e. Bantuan sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - g. Bantuan keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - h. Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pemerintah daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2. Belanja langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. Belanja pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - c. Belanja modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan dalam pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

4) Efektivitas

Menurut Ulum (2012: 31-32) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila suatu rasio yang dicapai mencapai 100%. Namun, demikian semakin tinggi ratio efektivitas, menggambarkan kemampuan penggunaan biaya semakin baik.

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016: 141). Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sangat Efektif : >100%
- b. Efektif : 90 %- 100%
- c. Cukup Efektif : 80 % - 90 %
- d. Kurang Efektif : 60 % - 90 %
- e. Tidak Efektif : < 60 %

C. METODE PENELITIAN

1) Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka dari latar belakang yang telah di sajikan pada bab sebelumnya maka peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif.

2) Populasi dan Sampel

➤ Populasi

Menurut Saban Echdar (2017:263) populasi diartikan sebagai kumpulan objek penelitian dari mana data akan di jaring atau dikumpulkan. Sedangkan Populasi dalam penelitian ini adalah anggaran dan realisasi belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.

➤ Sampel

Menurut Sugiyono (2018:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena pada keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sedangkan Menurut Saban Echdar (2017:264) sampel atau sering disebut juga condoh adalah wakil dari populasi yang ciri-cirinya akan diungkapkan dan digunakan untuk menafsir ciri-ciri populasi. Oleh karena itu, jika peneliti menggunakan sampel sebagai sumber data maka yang akan kita peroleh adalah ciri-ciri sampel (disebut statistik) bukan ciri-ciri populasi itu harus dapat digunakan untuk menaksir populasi. Sampel dari populasi ini adalah anggaran dan realisasi belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat pada tahun anggaran 2016-2018.

3) Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

4) Sumber Data

a) Data primer

Menurut Wiratna (2015:88) data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan menurut Sugiyono (2018:225) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data .

b) Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018:225) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Sumber data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

D. HASIL PENELITIAN

1) Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016-2018

Tabel Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Tahun 2016-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2016	16.575.339.332	15.331.030.636	92.49	Efektif
2017	28.068.416.175	25.545.113.802	91.01	Efektif
2018	22.191.297.100	19.461.067.119	87.69	Cukup Efektif

Sumber : LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat telah mencapai kriteria efektif dan cukup efektif. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas anggaran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 92.49 % dengan kriteria efektif. Pada tahun 2017, realisasi anggaran belanja sebesar Rp.25.545.113.802 dan target anggaran belanja sebesar Rp.28.068.416.175.

Tingkat efektivitas anggaran belanja yang terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 87.69 % dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 19.461.067.119 dan target anggaran belanja sebesar Rp. 22.191.297.100. dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan anggaran belanja berhasil menunjukkan hasil kinerja yang telah sesuai dengan yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan kriteria efektif dan cukup efektif.

2) Realisasi Kinerja Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat Menurut Program/Kegiatan Tahun 2016-2018.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat mengevaluasi dan menganalisis realisasi anggaran dalam bentuk program/kegiatan yang ada pada masing-masing bidang dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2016

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
Prog. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	4.551.834.246	3.880.039.775	85,24 %
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.551.834.246	4.268.558.837	93,78 %
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.796.700.000	1.696.060.000	94,40 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75.000.000	73.800.000	98,40 %
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	255.500.000	137.675.824	53,88 %
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	229.785.000	192.337.200	83,70%
Prog.Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.912.349.000	4.194.092.700	85,38 %
Prog.Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab./ Kota	201.470.000	174.180.000	86,45 %
Prog. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	866.840.000	714.286.300,-	82,40 %
TOTAL	16.575.339.332	15.331.030.636	

Sumber : LKjIP BKD 2016

Dari Tabel diatas menunjukkan dari masing-masing program pada tahun 2016 hampir terealisasi secara keseluruhan. Karena ada seperti program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang persentasenya masih kurang Efektif. Penyebab belum terealisasinya program tersebut disebabkan oleh Sasaran tupoksi belum terdistribusi secara merata dan Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2017

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
Prog. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	7.285.232.625,-	6.609.893.062,-	90,73 %
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.307.195.700,-	7.934.439.459,-	95,51 %
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.905.453.000,-	1.729.830.841,-	90,78 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	115.000.000,-	113.850.000,-	99,00 %
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	192.876.500,-	127.206.500,-	65,95 %
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	233.006.100,-	233.006.100,-	100 %
Prog.Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.883.828.750,-	6.688.116.340,-	97,16 %

Prog.Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab./ Kota	100.000.000,-	100.000.000,-	100 %
Prog. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	3.045.823.500,-	2.008.771.500,-	65,95 %
TOTAL	28.068.416.175	25.545.113.802	

Sumber : LKjIP BKD 2017

Dari Tabel diatas menunjukkan masih ada beberapa program yang belum terealisasi khususnya pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah yang masih belum Efektif. Yang disebabkan oleh Sasaran tupoksi belum terdistribusi secara merata dan Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2018

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Prog. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	5.770.751.000,-	5.564.666.744,-	96,43 %
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.302.971.100,-	5.073.392.485,-	80,49 %
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.451.163.000,-	1.188.358.069,-	81,89 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200.000.000,-	0.00,-	00 %
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	199.261.000,-	158.532.310,-	79,56 %
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	350.000.000,-	303.282.500,-	86,65%
Prog.Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.221.651.000,-	5.071.414.211,-	97,12 %
Prog.Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab./ Kota	450.000.000,-	429.850.000,-	95,52 %
Prog. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	2.245.500.000,-	1.671.570.800,-	74,44 %
TOTAL	22.191.297.100	19.461.067.119	

Sumber : LKjIP BKD 2018

Dari tabel diatas menunjukkan dari masing-masing program pada tahun 2018 masih ada program yang belum terealisasi. Khususnya Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang tidak terealisasi. Penyebab belum terealisasinya program tersebut disebabkan oleh Sasaran tupoksi belum terdistribusi secara merata dan Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

E. PEMBAHASAN

1) Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat

Hasil analisis dari Efektivitas anggaran belanja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat berdasarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

Tahun	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100$	Analisis Efektivitas	Kriteria
2016	$\frac{\text{Rp. 15.331.030.636}}{\text{Rp. 16.575.339.332}} \times 100$	92.49 %	Efektif
2017	$\frac{\text{Rp. 25.545.113.802}}{\text{Rp. 28.068.416.175}} \times 100$	91.01 %	Efektif
2018	$\frac{\text{Rp. 19.461.067.119}}{\text{Rp. 22.191.297.100}} \times 100$	87.69 %	Cukup Efektif

Data Hasil Olahan Penulis

Dari tabel diatas dapat dielaskan pada tahun 2016 tingkat efektivitas dari anggaran belanja pada persentase 92.49 % yang menunjukkan angka kisaran Rp. 15.331.030.636 pada tahun ini anggaran dapat dikatakan Efektif. Karena ada program yang belum terealisasi secara optimal seperti Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan persentase 53,88 %

Mengalami penurunan pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 1.48 % dengan persentase sebesar 91.01 % yang berada pada kisaran Rp.25.545.113.802 penurunan terjadi tidak terlalu signifikan pada tahun ini juga anggaran dikatakan Efektif. Karena ada program yang beleum teralisasi secara optimal dan diikuti dengan penurunan Prog. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah sebesar 16.45 % dimana pada tahun 2016 capaian persentase sebesar 82.40 % dan tahun 2017 sebesar 65.95 %.

Pada tahun 2018 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 3.32% dengan persentase sebesar 87.69 %, yang berada pada kisaran Rp.19.461.067.119, ditahun ini penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efektif karena ada salah satu program pada tahun ini tidak terealisasi seperti Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan persentase 0.00 %.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a) Tingkat kriteria Efektivitas Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016-2018 sangat berfluktuasi. Yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan terendah terjadi pada tahun 2018. Anggaran belanja pada tahun 2016 sampai dengan 2017 bisa dikatakan Efektif tetapi pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya dikatakan cukup efektif karena realisasi anggaran masih berbeda terhadap target, perbedaan ini terjadi karena adanya beberapa program/kegiatan yang telah dianggarkan namun belum dilaksanakan.
- b) Tingkat Efektivitas juga dipengaruhi oleh Anggaran dan Realisasi Belanja dari program-program belanja yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat. Belum terealisasi Program-program belanja tersebut dikarenakan rumitnya birokrasi dan Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

2) **Saran**

Saran bagi instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat adalah :

- a) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat, sebagai perencana anggaran untuk Kabupaten Lahat harus lebih meningkatkan program-program belanja dan kapasitas sumber daya manusia agar penyerapan anggaran belanja dari tahun ketahun lebih efektif.
- b) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah. Dengan kinerja yang baik maka efektivitas belanja juga akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran belanja agar tetap optimal.
- c) Penetapan target anggaran belanja harus disesuaikan dengan realisasi belanja Kabupaten Lahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Echdar, Saban. 2017. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Cet 1, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016, *Akuntansi Sektor Publik-edisi revisi*. UII Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. *Tentang Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 24 Tahun 2006 *Tentang Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif*. R&D. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, Wiratma. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Ulum, Ihyaul, 2012. *Audit Sektor Publik* , Jakarta: Bumi Aksara.